

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dampak dari tindakan kartel ini adalah berpengaruh terhadap kesadaran pemerintah dan otoritas ataupun instansi terkait untuk memberi aturan dan ketentuan baru untuk menertibkan tindakan kartel dalam hal ini dibidang bisnis pariwisata. Pengaruh tersebut terhadap memenuhi unsur kartel dalam kasus ini dapat terlihat pada data hasil analisa yang telah saya rangkum menjadi satu kesatuan yang sederhana, yaitu adanya kerugian materiil yang berdampak pada ekonomi pemerintah Provinsi di Bali.

Karena besarnya kerugian yang di dapat oleh pemerintah daerah dari praktek kartel tersebut seharusnya pemerintah memberikan sanksi kepada para pelaku asing tersebut. Akan tetapi di dalam bisnis pariwisata adanya sebuah kerenggangan dalam bisnis tersebut berarti putusya hubungan baik yang akan menimbulkan berkurangnya wisatawan asing untuk datang kembali ke tempat tersebut dalam hal ini yaitu bali yang disebabkan karena kerenggangan antara negara asal wisatawan dan daerah yang dituju oleh para wisatawan tersebut. Dalam dibuatnya jurnal penelitian ini ada berbagai identifikasi masalah yang telah dijabarkan yaitu dengan mencari informasi tentang bentuk dari sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama daerah bali dalam kasus kartel dan persaingan usaha tidak sehat lainnya dan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana penanganan terhadap kasus kartel ataupun persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup pada bidang hukum persaingan usaha dan penegakkannya di lingkungan KPPU serta bidang yang membawahi agen-agen travel baik berstatus lokal maupun mancanegara yang berpotensi adanya indikasi kartel

B. Saran dan Masukan

Penulis dalam hal ini berupaya memberi saran dan masukan terhadap pihakpihak serta otoritas terkait dalam menangani tindakan kartel yang merugikan banyak pihak ini. Salah satunya dengan membuat lembaga atau badan khusus pengawas yang bertugas di daerah-daerah yang memiliki dasar hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada. Rencana yang dibentuk juga memuat terkait badan hukum ini guna membantu tugas otoritas terkait untuk menindaklanjuti, pemerintah untuk mengawasi dan menerbitkan aturan hukum secara menyeluruh dan asosiasi yang mendukung adanya lembaga dan memfasilitasi badan-badan hukum ini. Serta dibentuk adanya daftar hitam dan daftar putih terhadap pengusaha travel yang telah ditertibkan maupun baru akan menggunakan usahanya di daerah tersebut. Agar dapat meminimalisir masyarakat untuk memilih daftar agen travel mana yang sesuai baku oleh standar hukum daerah tersebut.